

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu daerah dan pemerataan pendapatan bagi suatu penduduk suatu daerah. Cara paling mudah untuk mengartikan pembangunan ekonomi adalah dimana pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan. Artinya, ada tidaknya pembangunan ekonomi suatu daerah pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lain yang berlaku dari berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2006). Melalui penetapan 8 butir Tujuan Pembangunan Millenium atau *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2000, 189 negara anggota PBB merumuskan suatu komitmen untuk mencapai tujuan kemajuan yang nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan manusia lainnya (UNDP, 2003). Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.

Mathiassen dalam Nasir dkk (2008), mengidentifikasi indikator kemiskinan dari survei pengeluaran rumah tangga, antara lain angka buta huruf,

pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sektor pekerjaan utama kepala rumah tangga, kepemilikan asset rumah tangga (barang-barang yang bernilai mahal, kendaraan, alat komunikasi, dan lain-lain), kondisi perumahan, komposisi demografi (jumlah anggota rumah tangga, angka ketergantungan, umur, dan jenis kelamin kepala rumah tangga, jumlah anak dibawah 15 tahun).

Permasalahan kemiskinan di Indonesia juga menjadi perhatian penting. Hal itu sesuai dengan RPJMN 2015-2019 bahwa salah satu dari masalah pokok bangsa adalah melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional yang terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial. Kemiskinan adalah sebuah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan kesehatan. Perhatian pemerintah Indonesia terhadap kemiskinan dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Penurunan jumlah kemiskinan hingga 8,2 persen pada tahun 2009 merupakan salah satu sasaran pertama dalam hal agenda pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

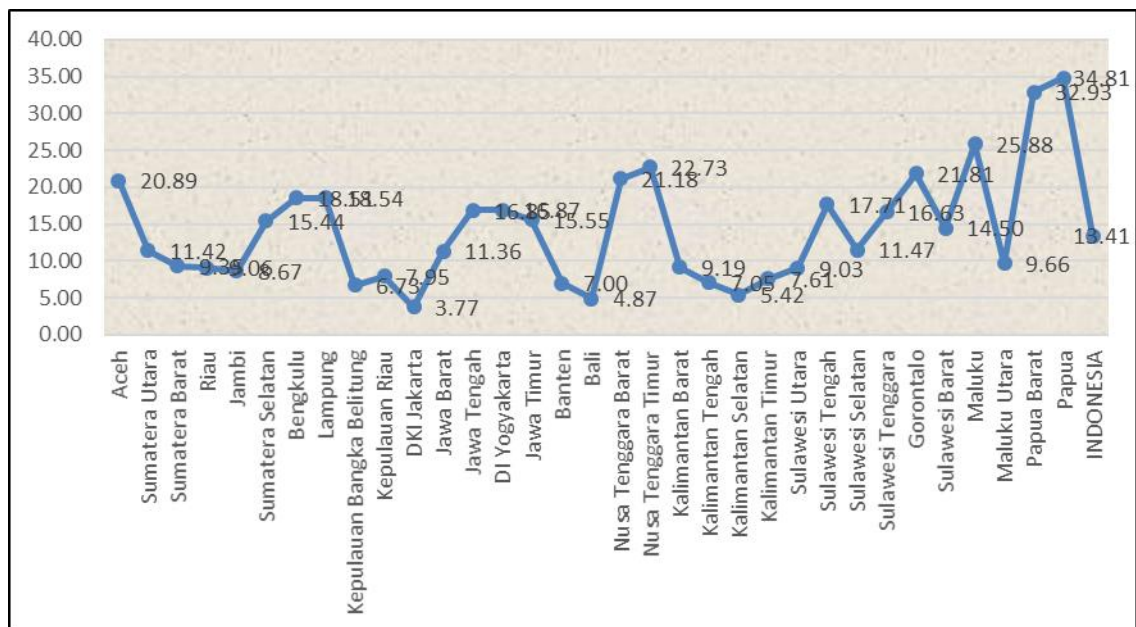
Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia sejak dulu hingga sekarang dan sampai saat ini belum ada bentuk penyelesaian yang tepat yang terlihat dari pemerintah. Meskipun berbagai perencanaan, kebijakan serta program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan pada intinya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Upaya pengentasan dan pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif, mencakup seluruh aspek kehidupan dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat

pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil pembangunan (Soegijoko, 2001).

Seperti yang diungkapkan Suebu (1995), bahwa Papua merupakan salah satu provinsi yang memiliki warisan flora dan fauna yang punya spesies-spesies yang sangat unik dan kaya. Potensi ekonominya dijuluki sebagai raksasa yang sedang tidur, dan warisan budayanya dijuluki wilayah kebudayaan yang sangat unik dan kaya, memiliki bahasa lokal yang berjumlah tidak kurang dari 250 bahasa. Jumlah penduduknya sekitar 1 persen dari penduduk Indonesia, yang sebagian dari mereka hidupnya relatif miskin di atas kekayaan alam yang melimpah, kondisi infrastruktur dan kualitas sumberdaya manusia yang belum memadai, serta laju pembangunan di provinsi ini dijuluki sebagai tanah yang terlupakan. Secara singkat Provinsi Papua merupakan aset nasional yang agak terbengkalai penanganannya, tetapi sekaligus merupakan aset simpanan untuk keperluan masa depan bangsa dan negara.

Susilo Bambang Yudhoyono pada era pemerintahannya menegaskan kepeduliannya untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan tersebut kemudian dirumuskan dengan *new deal* dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ringkasan dari *new deal* tersebut tertuang dalam prinsip *triple track strategy* : *pro-growth*, *pro-job*, dan *pro-poor*. Track pertama dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan dengan mengutamakan ekspor dan investasi. Track kedua, menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, merevitalisasi pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi pedesaan untuk mengurangi kemiskinan.

Sejak diaktifkan kembali program-program pengentasan kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin, (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) secara perlahan berhasil diturunkan jumlahnya. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2011 sebesar 28.596,60 jiwa (13,41 persen). Dibandingkan penduduk miskin pada tahun 2011 sebesar 30.018,93 jiwa (11,66 persen) berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2.000 jiwa (BPS 2013)



Sumber : Lampiran

Gambar 1.1 Rata-rata Persentase Penduduk Miskin di Indonesia (33 Provinsi) 2008-2012 (%)

Provinsi Papua merupakan salah satu contoh daerah yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Masih tingginya angka kemiskinan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua, membuat provinsi ini terus dilanda permasalahan kemiskinan. Pada Gambar 1.1 menunjukkan tingkat rata-rata kemiskinan di Indonesia (33 provinsi). Dalam perbandingan tingkat kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia tahun 2008–

2012, Papua menduduki peringkat pertama provinsi termiskin di Indonesia yang mempunyai rata-rata kemiskinan sebesar 34,81 persen.

Kondisi sebagian besar alam di Papua cukup memprihatinkan, karena pemanfaatan sumber daya (hutan) di Papua yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui program pembangunan yang dijalankan pada saat itu lebih banyak merepresentasikan kepentingan elit di pusat, sehingga tidak menyentuh sedikitpun kepentingan masyarakat Papua. Tidak hanya itu, karena atas kebijakan pemerintah pusat seperti pengelolaan lahan hutan untuk kepentingan komersial yang arahnya kepada eksploitasi, penyebaran penduduk dari Jawa melalui transmigrasi, dan pemberian izin pengelolaan tambang kepada Freeport akibatnya masyarakat asli Papua semakin kehilangan akses terhadap sumber penghasilan dan mata pencaharian mereka. Kondisi geografis yang sulit juga membuat masyarakat Papua sulit dalam mengakses atau mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan sehingga banyak masyarakat Papua yang buta huruf. Fasilitas yang dibutuhkan masyarakat cenderung hanya memusat ke kota-kota besar yang ada di Papua sehingga masyarakat yang hidup di pedalaman Papua hidupnya sangat memprihatinkan karena tidak terjangkau oleh pertumbuhan ekonomi. (Bappeda Provinsi Papua, 2013).

Proses pembangunan memerlukan pendapatan yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing wilayah mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga mampu mengurangi kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah disuatu daerah. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnya kemiskinan. Provinsi Papua merupakan provinsi termiskin pertama dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, provinsi ini harus bekerja keras untuk mengurangi tingkat kemiskinan agar pembangunan yang berjalan benar-benar dapat memberikan manfaat secara optimal di segala bidang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa yang berasal dari Papua bahwa pendidikan di setiap SD sudah ada, namun tenaga pengajarnya terbilang sedikit, rata-rata pemuda di Provinsi Papua setelah lulus SMA menganggur, bahkan banyak juga yang putus sekolah. Hal ini menjelaskan bahwa pendidikan di Papua masih tergolong kurang, karena kurangnya tenaga pengajar tersebut dan anak putus sekolah juga menjelaskan betapa kurang berkualitasnya sumber daya manusia sehingga memperlambat pembangunan. Sementara dari mata pencahariannya rata-rata sebagai nelayan dan petani dan untuk yang di hutan rata-rata petani sayur. Dari segi harga di Papua juga termasuk mahal, karena diatas rata-rata. Sedangkan penyumbang terbesar PDRB Provinsi Papua adalah sektor pertambangan, dari sini bisa dilihat bahwa masih kurangnya pemerataan pembangunan hasil dari pertumbuhan ekonomi. Hal inilah yang membuat Papua masih tergolong miskin, selain itu kurangnya kepedulian pemerintah terhadap akses jalan dari kota ke pedesaan membuat pedesaan sulit di akses, dan tidak mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang seharusnya didapatkan yang berhubungan dengan pembangunan.” (Wawancara N, K, H, Juli 2016).

Dari pemaparan diatas secara garis besar disebutkan bahwa kemiskinan bisa di pengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan pendidikan angka melek huruf. Jika penyebab utama kemiskinan yang terjadi di papua bisa di indentifikasi, hal ini bisa menjadi fokus pemerintah dalam mengatasi kemiskinan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua?
2. Bagaimana pengaruh angka melek huruf terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pengaruh pertumbuhan ekonomi, terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua.
2. Mendeskripsikan pengaruh angka melek huruf, terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademis

Dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa maupun pembaca dan dapat memberikan referensi bagi pihak perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura sebagai bacaan yang dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, khususnya dalam hal kemiskinan.

b. Manfaat Praktis

Sebagai masukan terhadap pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan khususnya Provinsi Papua

dan umumnya bagi seluruh Provinsi yang ada di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami secara lebih jelas, maka penulis membagi skripsi ini dalam lima bab sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka berisi tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini yang akan membentuk suatu kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab hasil dan pembahasan berisi mengenai gambaran umum obyek penelitian, uraian mengenai analisis data dengan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dan pembahasan mengenai hasil analisis penelitian.

5. Bab V Penutup

Bab penutup berisi kesimpulan yang diperoleh dalam pembahasan, keterbatasan, serta saran-saran bagi pihak yang berkepentingan.